Jurnal Ekono Insentif | Vol. 19 | No. 1 | April 2025
DOI : https://doi.org/10.36787/jei.v19i1.1603 Halaman 24 - 36

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Penduduk Daerah Lahan Gambut

YELLY ZAMAYA[1], RIZKY RIZALDI[2]

[1,2]Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau, Indonesia
Email : yelly.zamaya@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah lahan gambut yaitu di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti hampir keseluruhannya merupakan lahan gambut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data regresi linear berganda dengan menggunakan data sekunder. Dalam hal ini tingkat kemiskinan adalah variabel dependen, dan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), indeks pembangunan manusia (IPM), belanja pemerintah, dan jumlah penduduk sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertumbuhan ekonomi dan PAD yang tinggi tidak otomatis mengurangi kemiskinan karena aktivitas ekonomi tidak sesuai dengan ekosistem gambut. Kualitas pendidikan yang masih belum merata dan keterbatasan akses kesehatan membuat IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. belanja pemerintah tidak berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal gambut, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena dalam penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk, bukan yang usia produktif di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata kunci: tingkat kemiskinan, lahan gambut, masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the factors that influence the poverty rate in peatland areas, namely in Kepulauan Meranti Regency, Riau Province. The land in Kepulauan Meranti Regency is almost entirely peatland. The research method used is quantitative research with multiple linear regression data analysis techniques using secondary data. In this case the poverty rate is the dependent variable, and economic growth, regional own-source revenue (PAD), human development index (HDI), government spending, and population are the independent variables. The results showed that all variables in this study did not significantly affect the poverty rate in Kepulauan Meranti Regency. High economic growth and PAD do not automatically reduce poverty because economic activity is not in accordance with the peat ecosystem. The unequal quality of education and limited access to health make HDI have no effect on the poverty rate. Government spending does not focus on empowering local peat communities, and the population has no effect on the poverty rate because this study uses data on the total population, not the productive age in the Kepulauan Meranti Regency.

Keywords*: poverty level, peatland, community*

1. PENDAHULUAN

Lahan gambut sebagai ekosistem yang unik dan kaya akan sumber daya alam, memiliki peran penting dalam kehidupan sebagian masyarakat di Provinsi Riau. Namun, eksploitasi yang tidak berkelanjutan seringkali menimbulkan masalah lingkungan dan sosial-ekonomi, termasuk kemiskinan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut bergantung pada ekosistem ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan aktivitas perekonomian seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan bukan kayu **(Zamaya, 2021).** Ketergantungan ini membuat masyarakat rentan terhadap perubahan kondisi lahan gambut, seperti degradasi atau kebijakan pembatasan penggunaan lahan. Degradasi lahan gambut yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembalakan liar, konversi lahan, dan kebakaran dapat memperburuk tingkat kemiskinan.

Lahan gambut dan kemiskinan sering dikaitkan dan menjadi topik yang kompleks dan multidimensi. Kemiskinan dapat menjadi penyebab degradasi lahan gambut. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki pilihan selain memanfaatkan lahan gambut secara tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa contohnya diantaranya pembukaan lahan untuk pertanian, pembalakan liar, kebakaran lahan, dan sebagainya. Hubungan antara kemiskinan dan lahan gambut adalah hubungan yang saling memengaruhi. Di satu sisi, kemiskinan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan gambut secara tidak berkelanjutan, yang pada akhirnya menyebabkan degradasi lingkungan. Di sisi lain, degradasi lahan gambut dapat memperburuk kemiskinan dengan mengurangi sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Berikut adalah tabel tingkat kemiskinan masyarakat Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan atau Persentase (%) Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kuantan Singingi	8,91	8,97	8,24	8,07	7,89
2	Indragiri Hulu	5,96	6,18	6,14	6,06	6,02
3	Indragiri Hilir	5,93	6,18	5,98	5,64	5,66
4	Pelalawan	9,16	9,63	8,97	8,15	8,49
5	Siak	5,09	5,18	5,07	5,23	5,08
6	Kampar	7,38	7,82	7,12	7,04	6,92
7	Rokan Hulu	10,31	10,40	9,95	9,72	9,62
8	Bengkalis	6,40	6,64	6,32	6,31	6,36
9	Rokan Hilir	6,72	7,18	6,73	7,07	7,01
10	Kepulauan Meranti	25,28	25,68	23,84	22,98	23,15
11	Kota Pekanbaru	2,62	2,83	3,06	3,16	3,15
12	Kota Dumai	3,16	3,42	3,20	3,21	3,14
	Provinsi Riau	6,82	7,12	6,78	6,68	6,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Tabel diatas menunjukkan tentang dinamika tingkat kemiskinan di Provinsi Riau selama lima tahun terakhir. Secara umum, persentase penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami fluktuasi, dimulai dari 6,82 persen pada tahun 2020, naik menjadi 7,12 persen pada 2021, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 6,67 persen pada 2024. Meskipun terjadi peningkatan pada 2021, tetapi tren setelahnya cenderung membaik.

Kabupaten Kepulauan Meranti, yang meskipun mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari 25,28 persen pada tahun 2020 menjadi 23,15 persen pada tahun 2024, tetap menjadi daerah

dengan persentase kemiskinan tertinggi. Rokan Hulu juga termasuk wilayah dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi, meski menunjukkan penurunan dari 10,31 persen menjadi 9,62 persen dalam periode yang sama. Di sisi lain, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai mencatat tingkat kemiskinan terendah, meski keduanya mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2020.

Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin yang terbesar terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 23,15 persen. Terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah. Faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi **(Triono & Sangaji, 2023)**, Pendapatan Asli Daerah (PAD) **(Nizar & Arif, 2019)**, Indeks Pembangunan Manusia **(Sari, et al. 2023)**, belanja pemerintah **(Derek, et al. 2023)**, dan jumlah penduduk **(Hafiz & Kurniadi, 2024)**. Fokus pada penelitian ini adalah tingkat kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mayoritas daerahnya adalah lahan gambut.

1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka panjang, menjadi fokus utama dalam studi ekonomi pembangunan. Menurut teori pertumbuhan pertumbuhan ekonomi didorong oleh akumulasi modal, peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam modal fisik dan manusia untuk meningkatkan produktivitas dan output ekonomi. Selain itu, teori pertumbuhan endogen menyoroti peran inovasi dan pengetahuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal yang paling dianggap sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yaitu inovasi teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Kuznets dalam Jhingan (2000) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan dan menyediakan beragam barang dan jasa bagi masyarakatnya dalam jangka panjang. Peningkatan kemampuan ini dimungkinkan oleh kemajuan teknologi, perubahan kelembagaan, dan adaptasi ideologis terhadap kondisi yang ada. Sebelum mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP).

1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sektor, diantaranya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang telah dipisahkan, serta sumber pendapatan lain yang sah. Tujuan utama PAD adalah memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan lokal guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan prinsip desentralisasi. Dengan demikian, PAD memegang peran krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi PAD yang berhasil dikumpulkan, semakin besar kapasitas daerah untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan esensi otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan hukum yang berlaku. PAD

menjadi salah satu sumber penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, karena daerah tidak bisa hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Di era otonomi daerah, daerah perlu menggali potensi sumber pendapatan lokal untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. PAD juga menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian finansial pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan.

Pendapatan asli daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya secara mandiri. Tingginya PAD memungkinkan anggaran belanja daerah meningkat, khususnya dalam alokasi dana untuk kepentingan publik, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan—artinya, semakin sejahtera masyarakat, semakin rendah angka kemiskinannya. Dengan demikian, PAD memiliki peran penting dalam menekan kemiskinan di suatu daerah. Efektivitas pengelolaan potensi daerah akan mendorong pertumbuhan pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi jumlah penduduk miskin **(Kawulur, et al., 2019).**

1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran gabungan yang menilai kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah melalui tiga aspek utama: (1) kesehatan (dilihat dari angka harapan hidup), (2) pendidikan (diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta (3) standar hidup layak (ditentukan oleh pendapatan per kapita). IPM menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak semata-mata bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus memperhatikan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menjamin akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan tingkat pendapatan yang mencukupi.

IPM sering digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Beberapa studi menunjukkan bahwa wilayah dengan IPM tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, produktivitas ekonomi yang lebih baik, dan stabilitas sosial yang lebih terjaga (UNDP, 2020). Namun, kritik terhadap IPM juga muncul karena dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas pembangunan manusia, seperti mengabaikan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kualitas pendidikan, dan akses kesehatan yang tidak merata (Sen, 1999). Selain itu, IPM tidak secara langsung mengukur faktor-faktor seperti kebebasan politik, keberlanjutan lingkungan, atau kebahagiaan subjektif, yang juga penting dalam pembangunan manusia.

Perkembangan konsep IPM terus mengalami penyempurnaan, termasuk dengan diperkenalkannya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) untuk mengukur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa peneliti juga mengusulkan penggunaan indikator tambahan seperti tingkat kriminalitas, akses terhadap teknologi, dan kualitas lingkungan hidup untuk memperkaya analisis pembangunan manusia **(Anand & Sen, 2000).**

1.4 Belanja Pemerintah

Belanja atau pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran atau pengeluaran untuk tujuan kepentingan umum yang ditujukan untuk mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan kinerja masyarakat. Fokus belanja pemerintah adalah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal sebagai bagian dari kewajiban lokal mereka, sebagaimana tercantum dalam undang-undang, melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, fasilitas umum

dan sosial, pelayanan dasar, dan pengembangan jaminan sosial, dan perlindungan **(Safitri, 2021).**

Belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiscal dapat menjadi bentuk investasi yang signifikan, terutama jika dialokasikan untuk sektor pertanian **(Simanungkalit, 2020).** Salah satu contoh belanja pemerintah di sektor pertanian dapat mencakup berbagai program dan kegiatan, seperti subsidi pupuk dan benih, pembangunan infrastruktur pertanian (jalan, jembatan, irigasi), penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, penyuluhan dan pelatihan petani, serta pengembangan pasar dan akses petani terhadap lembaga keuangan. Investasi pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar domestik dan internasional, mendorong diversifikasi produk pertanian, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

1.5 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berperan sebagai indikator kunci dan faktor penting dalam aktivitas perekonomian. Sumber daya manusia ini merupakan modal pembangunan yang berpotensi besar untuk dimaksimalkan. Namun, ketika pertumbuhan kuantitas penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, hal ini justru dapat berbalik menjadi penghambat pembangunan. Dalam konteks Indonesia, yang dikategorikan sebagai penduduk mencakup seluruh individu yang telah menetap di suatu wilayah geografis selama lebih dari enam bulan, serta mereka yang tinggal kurang dari enam bulan tetapi memiliki niat untuk menetap secara permanen di wilayah tersebut.

Berikut tabel tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia, belanja pemerintah dan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dari tahun 2010 hingga tahun 2024.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pemerintah dan Jumlah Penduduk Tahun 2010 – 2024 Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau

No	Tahun	Tingkat Kemiskinan (Y)	Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	Pendapatan Asli Daerah (X_2)	Indeks Pembangunan Manusia (X_3)	Belanja Pemerintah (X_4)	Jumlah Penduduk (X_5)
1	2010	42,57	7,45	13.151.352.868	59,71	369.700.000.000	175.989
2	2011	34,53	6,88	26.519.080.971	60,38	423.920.000.000	175.989
3	2012	35,89	6,70	32.270.326.231	61,49	454.730.000.000	177.587
4	2013	35,74	4,24	40.190.000.000	62,53	601.960.000.000	178.839
5	2014	33,85	4,45	62.850.000.000	62,91	662.140.000.000	179.894
6	2015	34,08	2,85	54.827.443.833	63,25	629.040.000.000	181.095
7	2016	30,89	3,20	40.772.243.688	63,90	1.023.130.000.000	182.152
8	2017	28,99	3,29	80.941.082.098	64,70	969.290.000.000	183.297
9	2018	27,79	4,03	68.006.356.890	65,23	1.042.030.000.000	184.372
10	2019	26,93	2,64	79.075.541.780	65,93	1.206.580.000.000	185.516
11	2020	25,28	0,43	68.885.900.800	65,50	1.112.510.000.000	206.116
12	2021	25,68	2,56	96.649.421.820	65,70	1.010.160.229.550	209.460
13	2022	23,84	3,17	93.063.901.440	66,52	1.141.714.039.660	213.532
14	2023	22,98	4,81	144.788.332.830	67,28	1.121.150.000.000	217.607
15	2024	23,15	3,33	282.885.439.539	69,64	1.376.216.704.182	212.000

Sumber: Kepulauan Meranti Dalam Angka, BPS 2025

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 kecamatan, 5 kelurahan dan 96 desa yang hampir seluruh daerahnya berlahan gambut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki batas Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis pada sebelah utara, Kabupaten

Siak dan Kabupaten Pelalawan di sebelah selatan, Kabupaten Bengkalis pada sebelah barat, dan dengan Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau pada sebelah timur. Perhatikan gambar dibawah berikut ini.

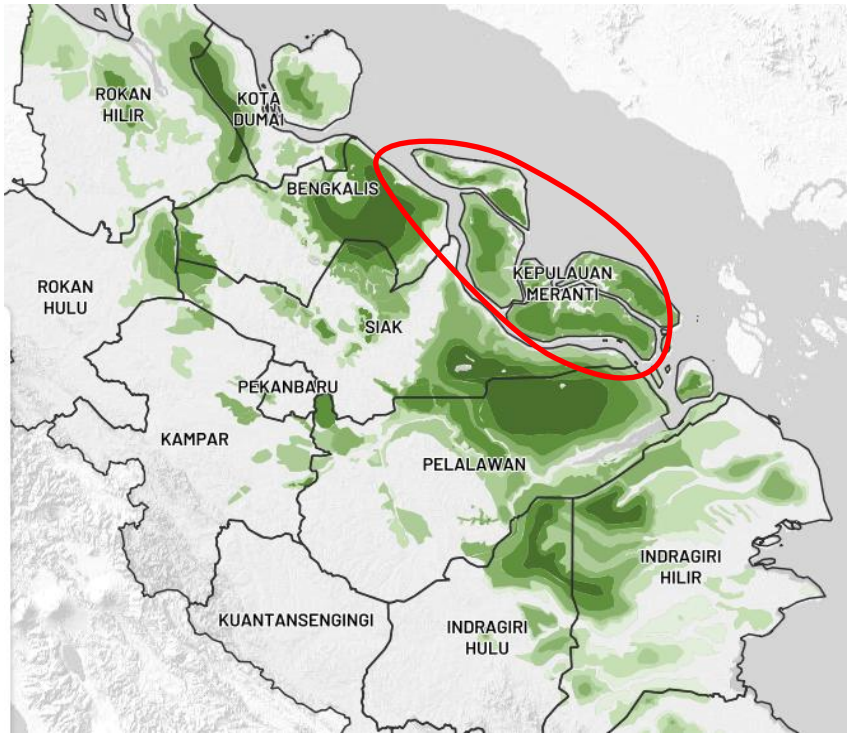

Sumber: prims.brg.go.id

Gambar 1. Lahan Gambut Provinsi Riau dan Kab. Kepulauan Meranti

2. METODE PENELITIAN

2.1 Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Y): Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti
Variabel Independen (X):
X_1: Pertumbuhan Ekonomi
X_2: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X_3: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
X_4: Belanja Pemerintah Kabupaten
X_5: Jumlah Penduduk Kabupaten

2.2 Hipotesis

Variabel Pertumbuhan ekonomi:
H_0: Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
H_1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

Variabel Pendapatan Asli Daerah:
H_0: Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
H_2: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

H_0: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
H_3: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan
Variabel Belanja pemerintah:
H_0: Belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
H_4: Belanja pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

Variabel Jumlah penduduk:
H_0: Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
H_5: Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan

2.3 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan struktur data time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Meranti, dan sumber terkait lainnya. Periode waktu yang dianalisis adalah tahun 2010-2024. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS.

2.4 Teknik Analisis Data
Uji Hipotesis: Menggunakan uji t untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
Uji F: Melakukan uji F untuk menguji signifikansi pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Analisis Koefisien Determinasi (R-squared): Menghitung nilai R-squared untuk mengetahui seberapa besar variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.967[a]	.935	.899	1.84006	.935	25.876	5	9	.000	2.439

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia
b. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji statistik yang disajikan dalam tabel, diperoleh nilai R square sebesar 0,935 atau 93,5 persen. Nilai ini mengindikasikan bahwa model regresi dengan variabel bebas meliputi pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja pemerintah, dan jumlah penduduk mampu menjelaskan 93,5 persen variasi dalam variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan. Sementara itu, sisanya sebesar 6,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	438.053	5	87.611	25.876	.000[b]
	Residual	30.472	9	3.386		
	Total	468.525	14			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan
b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia

Pada tabel diatas didapat bahwa F hitung 21,924 dengan tingkat signifikansi probabilitas 0,000 < 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	166.630	70.540		2.362	.042
	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	-.178	.453	-.057	-.394	.703
	Pendapatan Asli Daerah	3.065E-11	.000	.346	1.416	.190
	Indeks Pembangunan Manusia	-1.795	1.264	-.830	-1.420	.189
	Belanja Pemerintah	-4.068E-12	.000	-.226	-.602	.562
	Jumlah Penduduk	0.000	.000	-.272	-1.711	.121

Persamaan regresi linear berganda yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_1 X2 + \beta_1 X3 + \mu\ \beta_1 X4 + \beta_1 X5 + \mu$$

$$Y = 166{,}630 - 0{,}178X_1 + 0.00000000003065X_2 - 1{,}795X_3 - 0.000000000004068X_4 + 0{,}000X_5$$

Berdasarkan persamaan diatas merupakan model regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan (Y). Model ini melibatkan lima variabel independen: persentase pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), indeks pembangunan manusia (X_3), belanja pemerintah (X_4), dan jumlah penduduk (X_5).

Uraian hasil hipotesisnya sebagai berikut:
Untuk variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) memiliki tingkat signifikansi yaitu 0.703 > 0.05, Berarti hipotesis H_0 diterima, yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) memiliki tingkat signifikansi yaitu 0.190 > 0.05, berarti hipotesis H_0 diterima, yaitu PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tingkat signifikansi 0.189 > 0.05), artinya IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel belanja pemerintah memiliki tingkat signifikansi 0.562 > 0.05 artinya belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Untuk variable jumlah penduduk memiliki tingkat signifikansi 0.121 > 0.05, yang berarti jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dari hasil analisis data diatas juga didapat bahwa untuk semua nilai t-statistiknya lebih kecil dari t-tabel yaitu ± 2,262.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, maka untuk semua variabel yang diteliti pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan penduduk di lahan gambut yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat berbagai indikator yang menyebabkan hasil analisis ini memiliki hasil yang tidak berpengaruh. Salah satunya adalah lahan gambut yang memiliki produktivitas rendah untuk pertanian konvensional, sehingga pertumbuhan ekonomi dan PAD yang tinggi tidak otomatis mengurangi kemiskinan karena aktivitas ekonomi tidak sesuai dengan ekosistem gambut. Permasalahan PAD yang tidak diprioritaskan untuk program pengentasan kemiskinan juga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Meranti tidak menyerap tenaga kerja lokal, dampaknya terhadap kemiskinan menjadi minimal. Pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha, sementara masyarakat sekitar tidak menikmati manfaatnya artinya *trickle-down effect* gagal. Masyarakat lahan gambut pada umumnya memiliki tingkat perekonomian yang rendah terutama dalam bentuk hasil produksi, barang, uang, dan lain-lain. Tingkat pendidikan mereka relatif rendah karena lokasi tempat tinggal jauh dari sekolah yang lebih tinggi atau kurangnya dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan di sekolah lanjut. Situasi ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan tambahan melalui pelatihan berkelanjutan yang dapat diselesaikan bersamaan dengan pekerjaan.

Secara nyata, masyarakat lahan gambut menderita kemiskinan ekonomi karena beberapa faktor, antara lain lahan tandus dan rapuh, isolasi, rendahnya modal sosial, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan memiliki kerentanan. Mayoritas masyarakat yang tinggal di lahan gambut (pedesaan) bermata pencaharian sebagai petani, bercocok tanam, beternak, bertani, dan memancing. Budidaya sektor pertanian di lahan gambut memiliki hasil yang lebih rendah dibandingkan budidaya pertanian di lahan mineral. Berbagai kendala dalam bercocok tanam di lahan gambut antara lain: (a) relatif rendahnya kesuburan tanah, (b) kualitas air yang memiliki kandungan mineral, (c) ketebalan gambut dan tingkat kematangan, (d) luas permukaan gambut yang berkurang, (e) daya dukung lahan yang rendah, (f) terdapat lapisan pirit dan pasir, (g) sifat tanah dan air yang sangat asam, (h) mudah banjir pada pada musim hujan dan mudah terbakar pada musim kemarau. (Masganti, 2017).

IPM mengukur pendidikan, kesehatan, dan daya beli secara agregat, namun tetapi bisa terdistorsi karena angka partisipasi sekolah tinggi tetapi kualitas pendidikan rendah, akses kesehatan ada, tetapi kurang menjangkau komunitas terpencil di gambut. Tingkat kemiskinan disebabkan karena menurunnya produktivitas masyarakat akibat dari pengaruh tingkat pendidikan terhadap pembentukan modal sumber daya manusia. Pendapatan mereka yang terlalu rendah menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Akumulasi modal sumber daya memegang peranan krusial dalam penanggulangan kemiskinan melalui dua mekanisme utama: (1) memperbesar persediaan alat-alat produksi di tingkat masyarakat, dan (2) mendongkrak kapasitas produktif warga. Kedua efek ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan pendapatan dan perbaikan taraf hidup masyarakat.

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan yaitu ketertinggalan dalam meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam sebaiknya. Pengelolaan sumber daya alam sangat bergantung pada produktivitas manusia. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan sebagian besar penduduk menyebabkan kurangnya keterampilan teknis, pengetahuan dan aktivitas kewirausahaan, yang secara otomatis menyebabkan pengabaian, keterbelakangan dan bahkan penyalahgunaan sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, sumber daya alam merupakan

sumber utama kebutuhan hidup manusia, sehingga kekurangan sumber daya alam menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kurangnya sumber daya alam merupakan penyebab dan konsekuensi dari kemiskinan manusia. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia juga menjadi penyebab kemiskinan. Kurangnya keterampilan menyebabkan berkurangnya pendapatan, berkurangnya daya beli, dan lingkaran setan kemiskinan. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Modal manusia atau human capital mempengaruhi tingkat IPM (Prasetyoningrum, 2018).

Lahan gambut memiliki daya dukung terbatas. Jika jumlah penduduk meningkat tetapi tidak diimbangi dengan lapangan kerja berkelanjutan, kemiskinan tetap tinggi. Kebijakan moratorium gambut atau larangan pembakaran lahan bisa membatasi pendapatan masyarakat yang bergantung pada pertanian tradisional. Kerusakan gambut seperti kekeringan dan kebakaran mengurangi produktivitas lahan, sehingga pertumbuhan ekonomi atau belanja pemerintah tidak cukup untuk mengompensasi kerugian.

Begitu juga dengan belanja pemerintah yang lebih fokus pada infrastruktur fisik (jalan, gedung) daripada pemberdayaan masyarakat lokal gambut untuk pengetasan kemiskinan, maka belanja pemerintah juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Pengentasan kemiskinan adalah tugas untuk melayani kebaikan bersama. Misalnya, program penanggulangan kemiskinan melalui alokasi anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kurang mampu mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu, berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan kemiskinan (Bandiyono, 2018).

Hasil penelitian ini juga didapat bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. hal ini didukung hasil penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dari data yang ditampilkan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan terus berkurang meskipun jumlah penduduk meningkat, namun tidak berpengaruh secara signifikan. Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut harus mampu meningkatkan potensi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal tanpa merusak lingkungan. Dari perspektif pertanian, potensi ekonomi lahan gambut memiliki keterbatasan yang signifikan, sehingga sulit dikembangkan menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem. Jika kesadaran ekologis tidak dibangun, peningkatan ekonomi justru berisiko menjadi bumerang ketika dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas yang merusak lingkungan. Fenomena kemiskinan dan keterbatasan akses yang dialami warga di wilayah gambut seringkali menyebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap kelestarian lingkungan.

Sifat gambut yang rapuh membuat pertanian di lahan gambut memiliki risiko kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan lahan lainnya. Kebakaran lahan, banjir dan kekeringan nampaknya merupakan masalah berulang yang menimpa para petani lahan gambut. Masalah yang paling krusial dan harus segera diselesaikan bagi masyarakat miskin dan terbelakang adalah kurangnya peluang ekonomi dan penghidupan berkelanjutan di lahan gambut. Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut harus mampu meningkatkan potensi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal tanpa merusak lingkungan. Terbatasnya kelayakan ekonomi lahan gambut dari sudut pandang pertanian menimbulkan tantangan dalam menemukan kemungkinan lain yang memungkinkan masyarakat membuat pilihan mata pencaharian yang layak dan ramah lingkungan. Oleh

karena itu, peningkatan kinerja ekonomi juga harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran akan keberlanjutan ekologi. Tanpa kesadaran ekologis tersebut, kemajuan ekonomi justru berpotensi menimbulkan dampak negatif, dimana peningkatan pendapatan mungkin akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara tidak sadar memperburuk kerusakan lingkungan.

Gambut mempunyai peranan penting untuk menjaga iklim dunia, sehingga usaha untuk menjaga kelestarian lahan gambut harus selalu dilakukan. Cara termudah untuk menyelamatkan gambut adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Namun, kerapuhan dan keterbatasan lahan gambut sebenarnya menyebabkan sebagian besar masyarakat yang bergantung dan melindungi lahan gambut hidup dalam kemiskinan. Program pengurangan kemiskinan memang telah berhasil menekan jumlah penduduk miskin, namun kesejahteraan masyarakat di wilayah gambut masih memprihatinkan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai masalah kompleks yang saling terkait, seperti: (1) nilai tukar hasil produksi yang tidak menguntungkan, (2) tingkat produktivitas yang minim, (3) kualitas SDM yang terbatas, (4) kesenjangan akses terhadap pembangunan, (5) keterbatasan modal usaha, (6) posisi tawar yang lemah, serta (7) institusi lokal yang tidak efektif. Faktor-faktor inilah yang membuat masyarakat semakin terperangkap dalam lingkaran ketidakberdayaan. Kondisi gambut jenuh air (banjir) pada musim hujan dan kering (mudah terbakar) pada musim kemarau.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat di lahan gambut pada akhirnya menyebabkan biaya budidaya pertanian di lahan gambut relatif tinggi dan hasil panen relatif rendah. Masalah lainnya adalah risiko kegagalan. Sifat gambut yang rapuh membuat pertanian di lahan gambut memiliki risiko kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan lahan lainnya. Kebakaran lahan, banjir dan kekeringan nampaknya merupakan masalah berulang yang menimpa para petani lahan gambut. Masalah paling mendesak yang dihadapi masyarakat miskin dan terbelakang adalah kurangnya peluang ekonomi dan penghidupan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut harus mampu meningkatkan potensi ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal tanpa merusak lingkungan. Potensi ekonomi lahan gambut untuk kegiatan pertanian memiliki keterbatasan yang signifikan, sehingga sulit dikembangkan sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran ekologis, peningkatan ekonomi justru berisiko menjadi bumerang ketika dimanfaatkan untuk aktivitas yang tanpa disadari dapat memperparah kerusakan lingkungan.

Lahan gambut merupakan ekosistem istimewa yang memiliki multifungsi ekologis sekaligus karakteristik yang rentan terhadap gangguan. Situasi ini sebenarnya merupakan peluang berkembangnya berbagai lapangan kerja dan peluang usaha **(Zamaya, 2023).** Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat di kawasan lahan gambut yang memberikan peluang penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Pemanfaatan lahan gambut yang terus berlanjut untuk bercocok tanam tidak dapat segera diubah karena berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi dampak penurunan permukaan tanah. Upaya tersebut berupa memastikan, di satu sisi, sumber daya ekonomi masyarakat tetap termanfaatkan dan di sisi lain memperlambat laju penurunan. Inisiatif ini bertujuan untuk menggantikan budidaya tanaman yang memerlukan pengolahan air limbah, yang dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah, dengan membudidayakan tanaman khusus lahan gambut dan lahan basah yang cocok untuk budidaya di lahan gambut.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk semua variable yaitu pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja pemerintah dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang lebih dapat diimplementasikan dan berdampak secara langsung untuk mengatasi tingkat kemiskinan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada mata pencaharian masyarakat lokal, mengalokasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan kebutuhan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat secara langsung, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan membuat akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau untuk semua masyakarat, mengatur belanja pemerintah dengan lebih efektif dan efisien, serta mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti.

DAFTAR RUJUKAN

Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, *1*(1), 59–67. https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5

Anand, S., & Sen, A (2000). *The Income Component of the Human Development Index*. Journal of Human Development, 1, 83-106.

Badan Pusat Statistik, Kepulauan Meranti dalam Angka, 2025

Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Info Artha*, *2*(1), 11-28.

Derek, T. M., Lapian, A. L. C. P., & Tumangkeng, S. Y. (2023). Pengaruh pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(9), 49-60.

Hafiz, M., & Kurniadi, A. P. (2024). Pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, *8*(2), 143-166.

Haq, MU (1995). *Reflections on Human Development*. New York: Oxford University Press

https://infopublik.id/kategori/nusantara/725067/pemkab-meranti-turunkan-angka kemiskinan -dan-naikkan-ipm

Jhingan, M. L. (2002). Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Edisi Kesembilan. PT Raja Gravindo Persada. Jakarta.

Kawulur, S., Koleangan, R. A., & Wauran, P. C. (2019). Analisa pengaruh pendapatan asli daerah dan dana desa dalam menurunkan tingkat kemiskinan di 11 kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *19*(03).

Masganti, M., Anwar, K., & Susanti, M. A. (2017). Potensi dan pemanfaatan lahan gambut dangkal untuk pertanian. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, *11*(1), 43-52.

Nizar, F., & Arif, M. (2023). Pengaruh rata lama sekolah, pengeluaran perkapita, pendapatan asli daerah, investasi, tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat tahun 2012-2021. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, *4*(1), 48-58.

Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(2), 217-240.

Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *6*(2), 85-96.

Sari, D. T., Khusna, N. I., & Wulandari, F. (2023). Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu Kajian Berdasarkan Faktor Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Lokasi dan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, *8*(1), 37-50.

Sen, A. (1999). *Development As Freedom*. USA: Oxford University Press.

Simanungkalit, H., Ramashar, W., & Agustiawan, A. (2022). Pengaruh Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 728-736.

UNDP (United Nations Development Programme). 2020. *Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene*. New York.

Zamaya, Y. (2023). Mapping of The Potential Economic Sectors of Rengat Peatland. *Jurnal Agro Ekonomi*, *41*(1), 1-15.

Zamaya, Y., Tampubolon, D., & Misdawita, M. (2021). Penentuan Penggunaan Lahan Gambut Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Planologi*, *18*(2), 198-212.